



LAPORAN DELEGASI DPR RI MENGHADIRI

WPL Summit 2023 "Representation Matters"

7-8 June 2023, Brussels, Belgium



THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2023



LAPORAN DELEGASI DPR RI MENGIKUTI THE WOMEN POLITICAL LEADERS' (WPL) SUMMIT 2023

BRUSSELS, BELGIA
7 – 8 JUNI 2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

The Women Political Leaders' (WPL) Summit 2023 atau Konverensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Politik Perempuan 2023 lebih dari sekedar pertemuan; ini adalah momen bagi para politisi perempuan di seluruh dunia untuk terhubung, berbagi, dan membayangkan masa depan mereka.

Merayakan hari jadinya yang ke-10, KTT WPL 2023 menyambut lebih dari 200 politisi dari 80 negara yang bergabung dalam panel dan pidato mendalam mengenai topik perdamaian, keamanan, dan – pada dasarnya – mengapa “Representasi Itu Penting”.



KTT WPL tahunan adalah pertemuan terbesar para politisi perempuan di seluruh dunia, termasuk beberapa pemimpin paling berkuasa di dunia. Forum ini mengumpulkan dan memberikan platform bagi para pemimpin yang pengaruhnya menginspirasi perempuan untuk masuk dan bangkit dalam politik.

KTT WPL diselenggarakan bersama oleh badan-badan parlemen dan pemerintah di setiap wilayah besar di dunia, di Afrika (Rwanda, Komisi Uni Afrika di Ethiopia), Amerika (Meksiko), Timur Tengah (Yordania), Asia-Pasifik (Jepang), dan Eropa (Islandia, Lituania, Parlemen Eropa di Belgia).

WPL telah muncul sebagai kekuatan global, berkomitmen untuk meningkatkan jumlah dan pengaruh perempuan dalam posisi kepemimpinan politik. WPL menyediakan platform bagi para pemimpin perempuan untuk berkontribusi pada wacana global, selalu dari sudut pandang mereka sebagai pemimpin politik perempuan. WPL telah menjadi tuan rumah bersama para pemimpin selama Majelis Umum PBB, KTT G20, Pertemuan Pemimpin APEC, Pekan Davos, Konferensi Keamanan Munich, dan Forum OECD. Menghimpun perempuan yang telah mencapai posisi tertinggi dalam politik nasional, WPL telah menjadi tuan rumah bagi lebih dari 2.000 Anggota Parlemen dan hampir 40 Presiden dan Perdana Menteri perempuan, termasuk 29 penerima WPL Trailblazer Award.

Untuk memperingati ulang tahunnya yang ke 10, WPL akan menekankan pesan bahwa “Representasi Itu Penting” dengan menjadi tuan rumah bersama KTT WPL 2023 di dua Parlemen selama dua hari di Brussels, Belgia. Dalam pengambilan keputusan politik yang mencerminkan pengalaman dan perspektif masyarakat dunia, pesan yang ingin disampaikan jelas: Keterwakilan itu penting.

B. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri *The Women Political Leaders' (WPL) Summit 2023* di Brussels, Belgia pada tanggal 7-8 Juni 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 38/KU.05.01/ST/KSOI/05/2023, tanggal 31 Mei 2023.

C. TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

Memperoleh gambaran strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik demi kebaikan global. Serta mendorong partisipasi perempuan dalam diskusi dan pelaksanaan program perdamaian dan keamanan, dan pentingnya perspektif perempuan dalam politik.



D. SUSUNAN DELEGASI

NO.	N A M A	NO. ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI
1.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI	A-179	Anggota BKSAP / Ketua Delegasi	F-PDI Perjuangan
2.	PUTERI ANETTA KOMARUDIN	A-563	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi	F-Golkar
3.	SAKINAH ALJUFRI	A-487	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi	F-PKS
4.	DEWI CORYATI	A-239	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi	F-PAN

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Sebagai persiapan menghadiri *The Women Political Leaders' (WPL) Summit 2023* di Brussels, Belgia, Tenaga Ahli dan Sekretariat Biro KSAP mengolah materi sebagai bahan rujukan dari berbagai masukan yang komprehensif.



II. LAPORAN SIDANG
A. SUSUNAN ACARA

Agenda Kegiatan

09.30-09.45	Opening of WPL Summit Day 1 (07 June 2023)
09.45-10.35	Panel 1: Lead like a woman: peace and security
10.40-10.50	Keynote Speech: Sahle-Work Zewde
10.50-11.35	Panel 2: War, Oppression and Strongmen
11.40-11.50	Keynote Speech: Malene Schiappa
12.10-12.30	Fireside Chat
12.30-13.50	Lunch Break
14.00-14.45	Panel 3: The truth is what you make it? Navigating alternative facts, disinformation and conspiracy theory.
14.50-15.00	Keynote Speech: Natalia Gavrilita
15.00-15.45	Panel 4: Can we keep the UN Charter alive?
15.45-16.15	Coffee Break
16.15-17.00	WPL Peace Awards
17.00-17.10	Keynote Speech: Sviatlana Tsikhanouskaya
17.10-17.20	Keynote Speech: Roberta Metsola
17.30	Closing WPL Day 1

09.00-09.15	Opening WPL Summit Day 2 (08 June 2023)
09.20-09.30	Keynote Speech: Eliane Tillieux
09.30-10.15	Panel 1: Representation Matters
10.20-10.30	Keynote Speech: Helena Dalli
10.40-11.25	Panel 2: Violence Against Women in Politics
11.30-11.40	Keynote Speech: Stephanie D'Hose
11.40-12.25	Panel 3: Sexism in Politics
12.30-12.40	Keynote Speech: Mary Robinson
12.45-14.00	Lunch Break
14.10-14.40	WPL Trailblazer Awards



14.40-18.00	National delegation statements on “Increasing the number and influence of women in politics – what works”
18.00	Closing WPL Summit

B. FORMAT KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar yang dibagi menjadi beberapa sesi dan dilaksanakan dalam 2 hari. KTT WPL 2023 dihadiri lebih dari 200 politisi dari 80 negara yang bergabung dalam panel dan pidato mendalam mengenai topik perdamaian, keamanan, dan – pada dasarnya – mengapa “Representasi Itu Penting”.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. SEMINAR HARI KE-1

a. Panel 1: Lead like a woman: peace and security

Pada panel pertama dalam WPL Summit 2023 ini mengambil tema peran perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan internasional. Pada panel ini menghadirkan: Irene Fellin selaku NATO Secretary General's Special Representative for Women, Peace and Security, Sahar Albasar is an Anggota Parlimen Mesir, Rozalia Biro Wakil Ketua Parlemen Romania, Evelyn Regner Wakil Presiden European Parliament, dan Lindani Dlamini Presiden Senat Eswatini.

Kepemimpinan perempuan semakin dibutuhkan dibandingkan sebelumnya ketika konflik dan krisis kemanusiaan menjadi lebih kompleks, penuh kekerasan dan meluas, serta ditambah dengan ancaman baru seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim. Perempuan mempunyai hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka, termasuk dalam proses perdamaian dan resolusi konflik.

Suara, keterwakilan dan kepemimpinan perempuan sangat penting untuk memajukan agenda perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan. Hal ini penting karena akan memberikan perspektif perdamaian yang lebih baik dan lebih luas serta dapat mengakomodasi resolusi yang lebih inklusif.

- **Keynote Speech: Sahle-Work Zewde** (President of Ethiopia)
Presiden Sahle-Work Zewde menyampaikan pidato utama di Parlemen Eropa pada pembukaan KTT WPL dengan tema “Representasi itu penting” Beliau merefleksikan banyak tantangan dalam Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, dan bahwa keterwakilan tidak hanya bersifat numerik tetapi harus disertai dengan kekuatan dan pengaruh.





Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri WPL Summit 2023 yang mengangkat tema "Representation Matters" (Dok BKSAP)

b. Panel 2: War, Oppression and Strongmen

Pada panel ke-2 dalam WPL Summit 2023 ini mengambil tema opresi rezim dictator yang sebagian besar adalah laki-laki terhadap masyarakat, terutama bagi kaum perempuan. Pada panel ini menghadirkan: Ismat Jahan dari Organization of Islamic Cooperation (OIC) Uni Eropa, Assita Anggota European Parliament, Katalin Cseh, Anggota European Parliament, Princess Esmeralda dari Kerajaan Belgia.

Penindasan terhadap perempuan merupakan ciri utama dari semua bentuk kontrol otoriter di seluruh dunia, namun masih sangat sedikit perhatian yang diberikan pada janji unik pemberontakan perempuan melawan pemerintahan otokratis. Para pemimpin otokratis ingin membatasi otonomi perempuan, mengontrol tubuh mereka, dan membatalkan klaim mereka atas kekuasaan publik. Rezim-rezim ini memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang tampaknya bermanfaat bagi perempuan, namun pada kenyataannya justru memperkuat pembagian kerja berdasarkan gender. Oleh karena itu, pemerintahan seperti ini secara efektif menjauhkan perempuan dari kehidupan publik.

Meskipun kesetaraan gender selalu diperdebatkan, penolakan terhadap kesetaraan gender dan aktivisme hak-hak perempuan menjadi semakin vokal, global, dan terorganisir dengan lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai aktor telah muncul dan menguat, termasuk kelompok agama dan aktor konservatif, kelompok populis dan nasionalis sayap kanan, kelompok hak asasi laki-laki dan gerakan ideologi anti-gender. Beberapa dari kelompok ini merupakan aktor yang sudah lama berdiri,



sementara kelompok lainnya, seperti gerakan ideologi anti-gender, baru muncul.

Mobilisasi kolektif perempuan sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan kesetaraan gender. Gerakan akar rumput dapat menjadi jembatan untuk mengakomodir pentingnya partisipasi perempuan di ruang publik. Mendorong keterlibatan perempuan dalam masyarakat juga menciptakan kesadaran dan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan untuk berkembang.



- **Keynote Speech: Marlene Schiappa** (Secretary of State for Social & Solidarity Economy & Associative Life of France)
Ada banyak kendala yang masih dihadapi perempuan dalam politik, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dalam politik, bias dalam partai politik, dan hambatan budaya yang terus berlanjut. Forum WPL ini menyediakan wadah untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut dan memberikan saran mengenai cara mengatasinya.

Dunia internasional perlu menyoroti dampak penting yang dapat ditimbulkan oleh perempuan dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak legislator perempuan akan memperbaiki demokrasi dengan tidak hanya menciptakan respons yang lebih besar terhadap kebijakan-kebijakan yang penting bagi perempuan, namun juga dengan memprioritaskan kerja konstituen, menggunakan praktik-praktik inklusif dan memfokuskan kembali politik pada isu-isu yang lebih penting bagi kehidupan kita sehari-hari.



- **Fireside Chat**

Sesi ini diisi oleh Katarina Barley, Wakil Ketua European Parliament dan Samuelu Teo, Ketua Parlemen Tuvalu. Pada sesi ini para panelis membahas terkait isu perubahan iklim dan bagaimana kerusakan lingkungan ini berdampak pada Masyarakat termasuk perempuan.

Mengambil contoh dari negara Tuvalu, negara ini adalah salah satu negara yang terancam eksistensinya akibat perubahan iklim. Tuvalu tidak hanya terancam akan tenggelam akibat meningkatnya ketinggian air laut, tetapi juga dari ancaman badai siklon yang semakin sering dan berskala besar. Perubahan iklim sangat memberikan dampak negatif pada Masyarakat, terutama kepada perempuan. Perempuan dan anak-anak adalah termasuk dalam kelompok yang paling beresiko terhadap dampak perubahan iklim.

Representasi perempuan dalam institusi pemerintah dan pembuatan kebijakan sangatlah diperlukan, mengingat saat ini hanya ada 6% anggota parlemen perempuan di Tuvalu. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan mengingat upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.



Delegasi BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin, Sakinah Aljufri dan Dewi Coryati pada forum WPL Summit 2023 (Dok BKSAP)

c. Panel 3: The truth is what you make it? Navigating alternative facts, disinformation and conspiracy theories

Pada panel ke-3 ini membahas terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai fakta dan disinformasi media yang mendiskreditkan



perempuan terutama dalam ranah publik dan politik. Sesi ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain: Frances Fitzgerald, Anggota European Parliament; Marina Kaljurand, Anggota European Parliament; Gisela Marziotta, Anggota Parlemen Argentina; Kira Rudik, Anggota Parlemen Ukraina.

Kekerasan Siber Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, telah muncul sebagai isu global yang berdampak buruk pada masyarakat dan juga demokrasi. Perempuan secara global mengalami berbagai bentuk kekerasan dunia maya, seperti pesan teks yang mengintimidasi dan eksplisit secara seksual, penguntitan, pelecehan, intimidasi, ancaman kekerasan melalui email, media sosial, gambar dan video, pornografi non-konsensual, perdagangan online, dan gender. disinformasi.

Narasi disinformasi gender bertujuan untuk melemahkan partisipasi perempuan yang bebas dan setara di ruang publik dan politik. Media sosial yang seharusnya memperkuat semangat demokrasi dan kesetaraan partisipasi perempuan, seringkali menjadi alat yang berbahaya terhadap partisipasi perempuan di ruang publik.

Terdapat kebutuhan mendesak untuk memerangi disinformasi gender online dengan memberikan respons kebijakan yang lebih baik, tindakan yang lebih preventif, dan peningkatan kesadaran di masyarakat. Merupakan kebutuhan mendesak bagi kami untuk memberikan ruang yang aman bagi perempuan dan korban lainnya untuk melapor tanpa rasa takut akan penganiayaan, dan kemungkinan adanya pembalasan dalam bentuk tuntutan pidana atau tuntutan perdata.



WPL Ketua Delegasi BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri berbincang dengan sesama peserta forum WPL (Dok BKSAP)



- **Keynote Speech: Natalia Gavrilita** (Prime Minister of Moldova)
Meskipun Moldova telah membuat komitmen internasional dan nasional untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, khususnya dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan berbagai Konvensi ILO, namun implementasinya masih tertinggal. Perempuan masih menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dan keterwakilan mereka dalam politik dan pengambilan keputusan di Moldova masih di bawah standar internasional.

Perempuan di Moldova menghadapi hambatan pendidikan dan pasar tenaga kerja yang spesifik. Sikap patriarki yang terus-menerus membatasi pilihan pendidikan dan pekerjaan mereka. Perempuan juga menghadapi praktik diskriminatif. Hal ini mencakup disparitas upah yang signifikan, pemisahan ke dalam pekerjaan dengan gaji lebih rendah, pembagian tanggung jawab pekerjaan dan keluarga yang tidak setara, dan terbatasnya akses terhadap pengasuhan anak. Pengusaha perempuan menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses terhadap pinjaman bank dan program pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang didanai negara.

Untuk dapat meningkatkan taraf hidup perempuan dan juga menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan, pemerintah bersama organisasi internasional merancang fokus program untuk perempuan. Beberapa diantaranya adalah: peningkatan partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan; pemberdayaan ekonomi; peningkatan kesadaran untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan; dan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan keuangan nasional. Perlu adanya peningkatan advokasi pendanaan publik yang transparan dan memadai untuk kesetaraan gender. Mendorong anggaran responsif gender di semua tingkat perencanaan dan penganggaran nasional sehingga sumber daya yang memadai dapat disalurkan secara transparan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

d. **Panel 4: Can We Keep UN Charter Alive?**

Pada panel ke-4 ini membahas terkait dengan relevansi Piagam PBB dalam hubungan internasional, isu perdamaian dan kesetaraan gender. Sesi ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain: Safak Pavey, Senior Advisor UNHCR; Maria Rachel J. Arenas, Anggota Parlemen Filipina; Pierrette Herzberger-Fofana, Anggota European Parliament; Abla Amawi, Senator Jordan; Olha Vasylevska-Smahliuk, Anggota Parlemen Ukraina.



Keamanan dianggap sebagai faktor terpenting bagi kelangsungan hidup manusia dan masa depan. Namun, keamanan adalah konsep yang rapuh. Seperti yang kita lihat, dunia sedang diguncang oleh berbagai konflik, peperangan, persaingan kekuatan besar, melemahnya kedaulatan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap kebebasan. Kerugian akibat runtuhnya keamanan terlalu besar: nyawa dan martabat manusia.

Untuk mengatasi tantangan global tersebut dan mencegah kerugian di masa depan, upaya multilateral harus ditempatkan sebagai solusi strategis. PBB harus memegang peran sentral dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Otoritas PBB harus didukung oleh semua negara untuk melindungi penerapan Hukum Internasional.



- **WPL Peace Award Ceremony**
WPL Peace Award memberikan pengakuan kepada negara-negara yang paling damai secara geografi dan dunia. WPL Peace Awards 2023 diberikan kepada negara-negara berdasarkan data tahun 2022 dari Global Peace Index (GPI), yang diproduksi oleh Institute for Economics and Peace. Penerima penghargaan antara lain: Islandia, Irlandia, Jepang, Kanada, dan Botswana.
- **Keynote Speech: Sviatlana Tsikhanouskaya**, National Leader of Belarus and Head of Transitional Cabinet
Sviatlana Tsikhanouskaya menyampaikan bahwa di masa perang, jelas bahwa lebih banyak perempuan dalam politik berarti lebih



banyak empati, kemanusiaan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Inilah hal-hal yang kita perlukan di dunia, saat ini dan selama-lamanya. Ia sangat mengapresiasi upaya WPL yang mempertemukan para politisi perempuan, sehingga kita bisa bertukar pengalaman dan saling menginspirasi.

Ia menambahkan wanita sering kali diabaikan dalam kehidupan ini. Terutama dalam dunia politik, yang masih dianggap sebagai “dunia laki-laki” bahkan di negara-negara demokratis, apalagi negara patriarki seperti Belarus.

Kisah revolusi Belarusia adalah kisah perempuan Belarusia. Saat ini, ada sekitar dua ratus tahanan politik perempuan di Belarus. Saya yakin salah satu dari mereka bisa menjadi politisi atau pejabat publik di masa depan Belarus yang demokratis, termasuk menjadi presiden. Namun pertama-tama, mereka harus tetap hidup dan harus dibebaskan.

Perjuangan perempuan Belarusia yang dimulai pada tahun 2020 belum berakhir. Kemenangan Belarusia atas rezim diktator Lukashenka tidak bisa dihindari. Kemenangan Ukraina atas revanchisme Rusia hanyalah masalah waktu dan solidaritas kita. Kemenangan demokrasi atas tirani adalah tugas dan kewajiban kita bersama.



- **Keynote Speech: Roberta Metsola, President of European Parliament**

Dalam pidatonya, Roberta Metsola menyampaikan keinginannya untuk melihat lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan, politik, bisnis, dan peran yang dapat membuat perbedaan. Perempuan telah menempuh perjalanan jauh, namun jalan di depan kita masih sangat panjang dan bergelombang.

Ia berpesan masyarakat memerlukan perubahan pola pikir yang nyata – perubahan paradigma – untuk memungkinkan lebih banyak inklusi, untuk melihat lebih banyak perempuan, terutama kaum muda, mencalonkan diri dalam pemilu, agar lebih banyak perempuan mengambil posisi kepemimpinan, untuk menyamakan kedudukan.

Parlemen Eropa akan terus memimpin dalam hal ini. Parlemen harus mempermudah mereka yang akan datang setelah kita untuk mendobrak lebih banyak batasan, dan menjadi pendorong perubahan.



WPL Ketua Delegasi BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri foto bersama para panelis Forum WPL (Dok BKSAP)

2. SEMINAR HARI KE-2

Keynote Speech: Éliane Tillieux, (President of the House of Representatives of Belgium)

Éliane Tillieux adalah Ketua Parlemen Perempuan pertama yang pernah terpilih di Belgia. Tillieux menunjuk pada akar dari diskriminasi yang secara historis dialami oleh perempuan, yang masih terus mereka derita hingga saat ini meskipun telah dilakukan berbagai upaya. Diskriminasi gender bersifat struktural karena berakar pada pola dan model seksis yang telah



berusia berabad-abad yang menentukan inferioritas posisi sosial perempuan. Secara tradisional, perempuan telah mengalami berbagai bentuk pengucilan dan menanggung beban yang tidak setara yang berakar pada peraturan sosial, organisasi, dan keputusan.

Untuk membalikkan semua hambatan terhadap perkembangan bebas perempuan dan keterlibatan penuh dalam semua bidang masyarakat, kita perlu menggabungkan kekuatan, parlemen nasional dan Uni Eropa, untuk mengatasinya.

Masyarakat yang setara adalah masyarakat yang adil. Karena memperjuangkan kesetaraan gender berarti memperjuangkan kebebasan. Demi kebebasan perempuan untuk menjalani kehidupan mereka sepenuhnya, dengan kemandirian, keamanan, martabat, dan harga diri. Memerangi kekerasan gender dalam bentuk apa pun harus menjadi prioritas semua orang.



a. Panel 1: Representative Matters

Pada panel ke-1 ini membahas terkait dengan pentingnya representasi perempuan dalam politik dan mengakomodasi kepentingan kesetaraan gender di ranah publik. Sesi ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain: Esperance Nyisafari, Wakil Presiden Senat Rwanda; Amalia Dolores G Medina, Anggota Parlemen Meksiko; Irene Charalambides, Anggota Parlemen Cyprus; Hanna Birna Kristjansdottir, UN Women; Doina Gherman, Anggota Parlemen Moldova.



Jumlah perempuan lebih dari separuh populasi, dan mereka harus terwakili secara setara. Representasi adalah landasan inti demokrasi. UN Women menemukan bahwa keterlibatan perempuan berdampak positif pada pengambilan keputusan - misalnya saja pengasuhan anak yang lebih baik di Norwegia dan lebih banyak proyek air minum di India yang dikaitkan dengan tingkat keterwakilan perempuan yang lebih tinggi.

Meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya keterwakilan dan kepemimpinan substantif, dapat mengarah pada perubahan kebijakan di bidang-bidang yang sangat penting untuk mendorong kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan.

Penelitian menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang lebih banyak di parlemen secara umum berkontribusi pada semakin besarnya perhatian terhadap isu-isu perempuan. Dengan partisipasi perempuan dalam politik, akan ada keterlibatan langsung perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan publik dan upaya untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik demi masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

b. Panel 2: Violence Against Women in Politics

Pada panel ke-2 ini membahas terkait kekerasan yang dialami oleh perempuan di kehidupan sehari-hari dan juga dalam politik. Sesi ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain: Mabel Memory Chinomona, Presiden Senat Zimbabwe; Carlien Scheele, Director of the European Institute for Gender Equality (EIGE); Ann Marie Vaz, Anggota Parlemen Jamaica; Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anggota European Parliament.

Kekerasan terhadap perempuan dalam politik merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang membatasi partisipasi perempuan dalam politik dan proses pemilu. Kekerasan terhadap perempuan yang aktif dalam kehidupan politik merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang bermanifestasi secara fisik, psikologis, dan seksual, baik secara langsung maupun online. Tujuan dari kekerasan ini adalah untuk membungkam perempuan dan mendorong mereka keluar dari ruang publik.

Tampaknya hambatan masuk bagi partisipasi dan kepemimpinan perempuan di arena politik merupakan masalah global. Pertanyaan mengenai gender dan politik adalah hal-hal seperti persentase perempuan di badan legislatif nasional; Keterwakilan laki-laki yang berlebihan dan keterwakilan perempuan yang kurang selalu menjadi topik utama yang dibicarakan. Terlepas dari kuota keterwakilan, pencalonan politik perempuan masih berada di bawah angka agregat.



Salah satu penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif adalah adanya distorsi dalam proses keterwakilan. Distorsi dapat terjadi dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada masa pencalonan, preferensi partai politik, dan pilihan pemilih. Bias-bias ini menjadi kondisi yang membuat perempuan tidak mungkin mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Dalam hal ini, partai politik mempunyai peran sentral dalam melakukan rekrutmen politik, pengembangan kaderisasi, pendampingan keuangan dan jaringan, serta distribusi politik bagi perempuan. Partai politik harus bertransformasi menjadi “pengubah permainan” untuk memastikan keterwakilan dan kepemimpinan politik perempuan.



- **Keynote Speech: Stephanie D’Hose**, (President of the Senate of Belgium)

Stephanie d'Hose sangat percaya pada hak-hak perempuan dan bakat perempuan. Bersama Eliane Tillieux, presiden Kamar Perwakilan Belgia, dia menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kesetaraan gender, termasuk dalam pertanyaan tentang upah dan cuti sebagai orang tua. Mereka berdua menargetkan Belgia bisa menduduki peringkat teratas Eropa dalam hal kesadaran gender.

Kesetaraan gender bukanlah suatu pilihan, namun suatu keharusan untuk mencapai dunia yang adil dan adil. Ia mencatat bahwa salah satu prioritas utamanya adalah meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan, akademisi, penegakan hukum, dan



bidang lainnya dengan menggunakan kombinasi tindakan afirmatif dan kompetensi profesional.

Pemberdayaan ekonomi dan inklusi keuangan perempuan juga telah membantu mereka memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin perempuan, kita harus memanfaatkan posisi dan mandat kita untuk mencapai dunia yang setara gender.

c. Panel 3: Sexism in Politics

Pada panel ke-3 ini membahas terkait diskriminasi berbasis gender dialami oleh perempuan di kehidupan sehari-hari dan juga dalam politik. Sesi ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain: Joyce Grant, Ketua National Alliance Party Papua New Guinea; Terry Reintke, Anggota European Parliament; Camila Crescimbeni, Wakil Ketua Parlemen Argentina; **Puteri Anetta Komarudin**, Anggota DPR RI; dan Karen Melchior, Anggota European Parliament.



Pada sesi ini **Puteri Anetta Komarudin** memaparkan bahwa seksisme terjadi pada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi sering kali dikelompokkan pada portofolio tertentu yang dianggap sebagai 'bidang perempuan'. Perempuan lebih cenderung menjadi ketua komite yang berkaitan dengan kesetaraan gender, dan kecil kemungkinannya untuk menduduki posisi di komite pertahanan, keadilan, urusan luar negeri, perdagangan dan keuangan, serta hak asasi manusia.



Putri berpendapat bahwa pelibatan perempuan dalam berbagai komite di lembaga legislatif juga penting untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan produk legislatif yang responsif gender.

DPR RI terus melakukan upaya untuk mengakomodasi pendekatan yang lebih responsif gender dalam proses legislasi. Perempuan terwakili di semua Komisi dan Badan di DPR RI. Beberapa Komisi diketuai atau diketuai oleh perempuan, seperti Komisi 1 yang menangani Urusan Luar Negeri dan Pertahanan; Komisi 9 yang menangani Kesehatan dan Ketenagakerjaan; Komisi 8 yang menangani masalah agama, sosial dan pemberdayaan perempuan; dan Komisi 10 yang menangani Pendidikan dan Olahraga.

Meskipun pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting dalam kesetaraan gender, kesetaraan gender bukanlah sebuah “masalah perempuan”, dan kesetaraan gender juga tidak dapat dikembangkan hanya melalui upaya perempuan di ranah publik atau privat.

- **Keynote speech: Mary Robinson**, Chair; Adjunct Professor for Climate Justice, Trinity College Dublin; President of Ireland (1990-1997)

Mary Robinson adalah pemimpin yang berprinsip dan transformatif untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan sepanjang masa jabatannya. Setelah menjabat sebagai Presiden Irlandia, ia diangkat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan menjabat dari tahun 1997 hingga 2002. Ia adalah anggota pendiri The Elders dan diangkat sebagai Ketua pada November 2018 setelah kematian Kofi Annan.

Ia menyampaikan bahwa dunia tidak berada di jalur yang tepat menuju dunia yang aman bagi anak dan cucu kita. Krisis iklim semakin cepat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dengan semua janji yang dibuat oleh pemerintah, perusahaan, baik melalui investasi atau filantropi, kita akan mencapai pemanasan global sebesar 2,4 derajat Celcius di atas tingkat pemanasan global pada masa pra-industri. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan suhu 1,5 derajat yang diakui secara ilmiah, yang harus kita capai jika kita ingin menjaga planet yang aman dan sehat sebagai tempat kita hidup. Sebagai pemimpin perempuan, ia menekankan bahwa harus menuju ke arah lain.

Mary menjelaskan inisiatif Project Dandelion yang merupakan cara untuk menghubungkan perempuan yang bekerja keras menuju jalur positif menuju iklim yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Project Dandelion membantu meningkatkan suara perempuan di tingkat akar



rumpun – “Dandelion” adalah bunga yang tangguh dan regeneratif yang tumbuh di semua benua.

Mary mendorong perempuan untuk menggunakan suara dan menyadari kekuatan sendiri sebagai agen perubahan, dan sebagai pemimpin perempuan di komunitas masing-masing.

WPL Trailblazer Awards

Penghargaan WPL Trailblazer diberikan kepada Presiden dan Perdana Menteri perempuan yang menjabat dan mantan perempuan karena berhasil memecahkan langit-langit kaca politik dan mencapai eselon tertinggi dalam kepemimpinan politik. WPL Trailblazer Awards diserahkan oleh Obiageli Ezekwesili, Ketua Dewan Pemimpin Politik Perempuan (WPL) dan Silvana Koch-Mehrin, Presiden & Pendiri WPL. Penerima penghargaan untuk tahun 2023:

- Sahle-Work Zewde, Presiden Etiopia
- Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia
- Natalia Gavriļiņa, Perdana Menteri Moldova (2021-2023)
- Mary Robinson, Ketua; Ajun Profesor Keadilan Iklim, Perguruan Tinggi Trinity Dublin; Presiden Irlandia (1990-1997)

National delegation statements on “Increasing the number and influence of women in politics - what works”

Statement Indonesian Delegation – Irine Yusiana Roba Putri

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 2024 yang mana pemilihan presiden dan legislatif akan diatur pada waktu yang bersamaan. Urgensi keterwakilan dan kepemimpinan perempuan di lembaga pemerintah dan parlemen masih menjadi topik perbincangan yang tidak bisa diabaikan oleh masyarakat.

Keterwakilan perempuan di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren positif. Pemilu tahun 2019 menandai angka tertinggi yaitu 20,9% bagi perempuan terpilih di parlemen nasional. Dan untuk pertama kalinya Indonesia memilih Ketua DPR Perempuan yang pertama.

Selain itu, keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya sekedar soal jumlah, namun lebih pada keterwakilan substantif dimana mereka dapat menghasilkan kebijakan yang responsif gender dan mendorong kesetaraan gender di masyarakat. Dengan perjuangan dan perjuangan yang panjang, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Kekerasan Berbasis Seks. Hal ini



memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan berbasis seks dan gender dalam kehidupan sosial mereka. Tren peningkatan keterwakilan perempuan ini berarti demokrasi Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih baik.

Keterwakilan perempuan dalam politik tidak tercapai tanpa hambatan. Jaringan politik, sumber daya keuangan, dan sikap patriarki di masyarakat tetap penting bagi elektabilitas perempuan dan memainkan peran penting sebagai penghalang bagi perempuan dalam politik.



Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berkomitmen untuk menghilangkan hambatan dan mendukung keterwakilan dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Upaya untuk mencapai kesetaraan dalam keterwakilan perempuan terus dilakukan.

Untuk menciptakan ruang yang aman bagi perempuan untuk berkembang, partai politik memainkan peran penting dalam mengubah narasi mereka dari ruang yang didominasi laki-laki menjadi institusi yang lebih inklusif. Penerapan kuota afirmatif 30% bagi perempuan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan diabaikan. Partai politik tidak boleh menjadikan keterwakilan perempuan sebagai representasi deskriptif belaka.

Pendampingan dan dukungan yang setara bagi perempuan selama pencalonannya sangat dibutuhkan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memulai jalurnya dari tingkat akar rumput dan memiliki



jaringan serta program yang berfokus pada perempuan, kemungkinan besar akan terpilih. Pendidikan politik dan kampanye strategis menjadi kunci peningkatan elektabilitas perempuan dalam politik.

Selain itu, upaya multilateral harus menjadi bagian dari strategi untuk mendorong keterwakilan dan kepemimpinan perempuan. Melalui kepemimpinannya di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Parlemen Indonesia bersama parlemen negara-negara ASEAN telah melaksanakan pertemuan Women of AIPA (WAIPA) pada awal Juni 2023.

Upaya ini akan menjadi platform dialog antar negara yang mendukung komitmen dan tindakan transformatif gender. Penting bagi organisasi-organisasi regional dan multilateral untuk menjadi promotor dan pelindung bagi keterwakilan dan kepemimpinan perempuan.

Ke depan, penting untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan posisi kepemimpinan di parlemen dan pemerintahan publik. Keterwakilan dan kepemimpinan perempuan yang substantif dapat meningkatkan keterlibatan langsung untuk kebijakan yang lebih responsif gender dan inklusif.



III. KESIMPULAN

A. ANGGARAN

Kegiatan Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri *Women Political Leaders Summit 2023* di Brussels, Belgia 7 – 8 Juni 2023 dilaksanakan dengan mata anggaran 001030.CF.5805.AEC.001.051.D.524211 sebesar Rp755.535.725 (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

B. KESIMPULAN

1. Keseluruhan acara seminar *Women Political Leaders Summit 2023 di Brussel, Belgia* berjalan lancar dan sukses.
2. Anggota DPR RI mendapatkan wawasan dan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan terkait dengan posisi perempuan dalam politik dan bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan politik.
3. Acara Seminar ini juga mendukung terjalinnya hubungan baik antara politisi, anggota parlemen dan pemerintah baik perempuan ataupun laki-laki untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender.

C. KETERANGAN DAN LAMPIRAN

Laporan kegiatan *Women Political Leaders Summit 2023 di Brussel, Belgia* dilengkapi dengan lampiran dan/atau dapat diunduh melalui link sebagai berikut:

1. Bahan dan Intervensi (terlampir)
2. [Dokumentasi](#) (link dokumentasi)
3. Publikasi media siber
 - a. [Puteri Komarudin Dorong Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Struktur Parlemen](#)



IV.PENUTUP

Delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada European Parliament, Parlemen dan Senat Belgia sebagai penyelenggara dan KBRI Brussels di Belgia, yang telah berkenan hadir untuk pendampingi delegasi DPR RI sehingga acara *Women Political Leaders Summit 2023* berjalan lancar dan sukses.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat dan Tenaga Ahli BKSAP DPR RI yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan acara *Women Political Leaders Summit 2023* ini.

Jakarta, 30 Juni 2023
Ketua Delegasi

Irine Yusiana Roba Putri





Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr